



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 930/34/I-BPKAD/2021**

## **TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) APBD DAN BLUD PADA UPTD RUMAH SAKIT MATA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

## **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBD dan BLUD pada UPTD Rumah Sakit Mata Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBD dan BLUD pada UPTD Rumah Sakit Mata Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 964/6040/XII/Keu/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD Tahun Anggaran 2022;
  2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 964/6041/XII/Keu/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BLUD pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menetapkan dengan hormat Drg. Shanty Sintessa W, M. Kes NIP. 19721003 200012 2 003 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Jabatan Direktur UPTD Rumah Sakit Mata Sebagai pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) APBD dan BLUD pada UPTD Rumah Sakit Mata Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 23 Desember 2021

**GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.